MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022

Komite Akreditasi Nasional
LSSM-019-IDN
LSSMKI-011-IDN

# URGENSI IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PEMERINTAH DAERAH



Konsultasi · Pelatihan · Pengembangan

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# UU

# Transformasi Pengelolaan Data Pribadi
# Paradigma Baru Perlindungan Data

**UU No.27 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (”UU PDP”) mengubah paradigma fundamental dalam pengelolaan data di Indonesia.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# UU

# Transformasi Pengelolaan Data Pribadi
# Paradigma Baru Perlindungan Data

**UU No.27 Tahun 2022**

Data pribadi bukan lagi sekadar informasi administratif, melainkan **hak fundamental** setiap warga negara yang harus dilindungi dengan serius. Transformasi ini menuntut seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengadopsi standar baru dalam pengelolaan data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022 | LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# UU

# Transformasi Pengelolaan Data Pribadi
# Paradigma Baru Perlindungan Data

**UU No.27 Tahun 2022**



*Pemda kini memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi warga yang dipercayakan kepada mereka dalam setiap layanan publik.*

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN



# MENGAPA UU PDP PENTING UNTUK PEMDA?

## Kebocoran Data Meningkat

Insiden kebocoran data di sektor publik terus bertambah,mengancam kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

## Volume Layanan Digital Bertambah

Transformasi digital mempercepat adopsi layanan online, meningkatkan volume data pribadi yang dikelola pemda.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN



# MENGAPA UU PDP PENTING UNTUK PEMDA?

## Risiko Reputasi dan Hukum

Kelalaian pengelolaan data dapat berujung pada sanksi hukum dan menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.

## Data = Aset Layanan Publik

Data pribadi warga adalah aset strategis yang harus dilindungi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# TANTANGAN UMUM IMPLEMENTASI PDP

Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi. Memahami tantangan ini adalah langkah pertama untuk menemukan solusi yang efektif dan realistis.

- Keterbatasan SDM
- Sistem Legacy
- Koordinasi Lemah

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# TANTANGAN UMUM IMPLEMENTASI PDP



## Keterbatasan SDM

Kekurangan pegawai dengan kompetensi keamanan data dan teknologi informasi yang memadai.



## Sistem Legacy

Infrastruktur IT lama yang sulit diintegrasikan dengan standar keamanan modern.



## Koordinasi Lemah

Silo antar-OPD menghambat koordinasi dan harmonisasi kebijakan PDP.

Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan pendekatan bertahap, pemanfaatan sumber daya eksternal (konsultan, pelatihan), dan komitmen kepemimpinan yang kuat. Slide berikutnya akan membahas tantangan ini secara lebih rinci dengan strategi mitigasinya.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# PEMETAAN LENGKAP TANTANGAN IMPLEMENTASI PDP

## 1. Tantangan Tata Kelola

- Belum ada struktur governance PDP yang jelas dengan peran dan tanggung jawab terdefinisi,
- Tidak ada DPO atau pejabat yang ditunjuk khusus untuk mengawasi implementasi PDP,
- Koordinasi antar-OPD masih lemah masing-masing berjalan dengan standar sendiri,
- Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah.

## 2. Tantangan Sistem dan Infrastruktur

- Sistem legacy yang tidak mendukung enkripsi dan kontrol akses modern,
- Infrastruktur IT yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi,
- Keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi keamanan,
- Data tersebar di berbagai sistem tanpa sentralisasi atau standarisasi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# PEMETAAN LENGKAP TANTANGAN IMPLEMENTASI PDP

## 3. Tantangan Proses dan Kebijakan

- Belum ada kebijakan PDP yang komprehensif di tingkat pemda,
- SOP pemrosesan data tidak terdokumentasi atau tidak diikuti secara konsisten,
- Tidak ada mekanisme untuk memenuhi hak-hak subjek data (akses, koreksi, hapus),
- Prosedur penanganan insiden belum tersedia atau tidak teruji.

## 4. Tantangan Sumber Daya Manusia

- Kurangnya pegawai dengan kompetensi keamanan data dan IT,
- Tingkat awareness keamanan data yang masih rendah di kalangan pegawai,
- Resistensi terhadap perubahan dan prosedur baru,
- High turnover pegawai IT yang berpengalaman.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

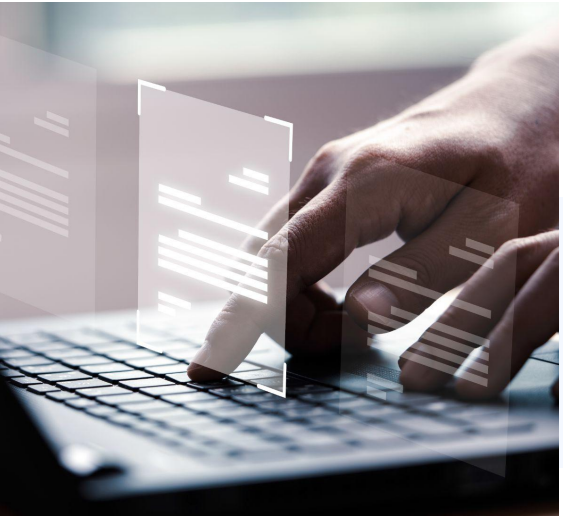
# PEMETAAN LENGKAP TANTANGAN IMPLEMENTASI PDP



## 5. Tantangan Budaya Operasional

- Kultur berbagi data yang tidak terkontrol, terutama melalui aplikasi chat,
- Kebiasaan menyimpan data di perangkat pribadi tanpa enkripsi,
- Anggapan bahwa keamanan data adalah tanggung jawab bagian IT saja,
- Prioritas pada kecepatan layanan mengabaikan aspek keamanan data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



# PRINSIP UTAMA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

UU PDP menetapkan tujuh prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam setiap pemrosesan data pribadi oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini memastikan data warga dikelola dengan standar tertinggi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# PRINSIP UTAMA
# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

## Legalitas / Dasar Pemrosesan

Pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tujuan Spesifik

Data hanya boleh dikumpulkan untuk tujuan yang jelas, spesifik, dan telah diinformasikan kepada subjek data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# PRINSIP UTAMA
# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

## Minimalisasi

Hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan pemrosesan, tidak berlebihan.

## Akurasi

Data yang dikumpulkan harus akurat, mutakhir, dan diperbarui sesuai kebutuhan untuk menjaga kualitas informasi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# PRINSIP UTAMA
# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

## Keamanan

Menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisatoris untuk melindungi data dari akses tidak sah atau kehilangan.

## Akuntabilitas

Mampu mempertanggungjawabkan dan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# PRINSIP UTAMA
# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

## Penyimpanan

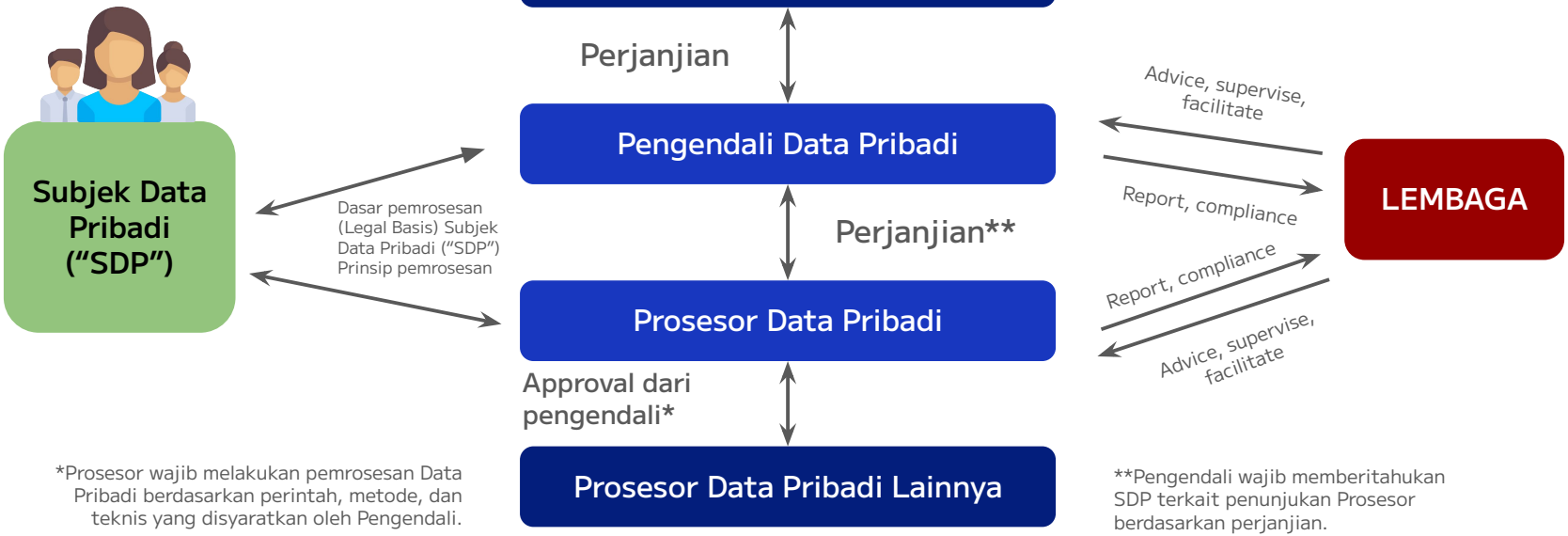
Data hanya disimpan selama waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan, lalu harus dihapus atau dimusnahkan.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022 | LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

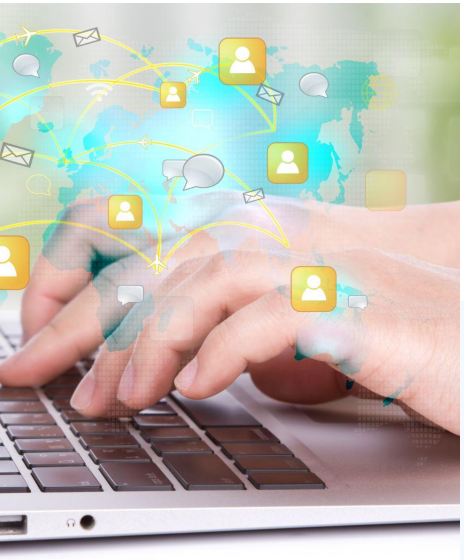



*Prosesor wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah, metode, dan teknis yang disyaratkan oleh Pengendali.

**Pengendali wajib memberitahukan SDP terkait penunjukan Prosesor berdasarkan perjanjian.

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

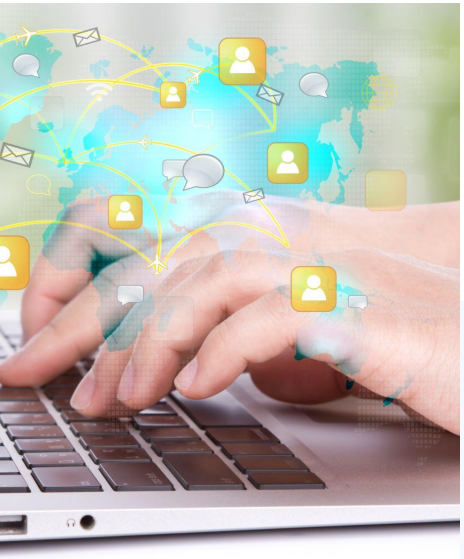


# KEDUDUKAN PEMDA SEBAGAI PENGENDALI DATA PRIBADI

## Peran dan Tanggung Jawab Strategis

Dalam konteks UU PDP, pemerintah daerah memiliki kedudukan sebagai **Pengendali Data Pribadi** . Ini berarti pemda adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi warga dalam setiap layanan yang diberikan.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

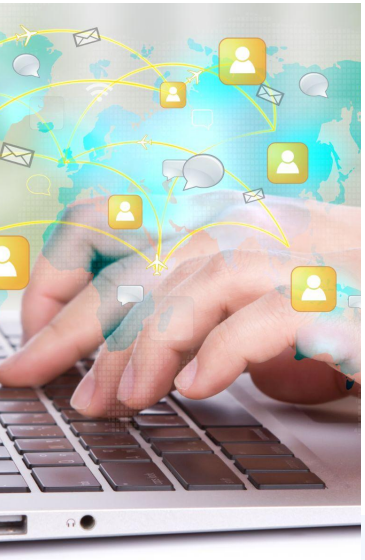


# KEDUDUKAN PEMDA SEBAGAI PENGENDALI DATA PRIBADI

## Peran dan Tanggung Jawab Strategis

Sebagai pengendali data, pemda memiliki kewenangan sekaligus kewajiban penuh untuk memastikan bahwa setiap data pribadi yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dibagikan dilakukan dengan standar keamanan tertinggi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



# KEDUDUKAN PEMDA SEBAGAI PENGENDALI DATA PRIBADI

## Peran dan Tanggung Jawab Strategis

### KEWAJIBAN UTAMA

- Mengamankan sistem dan infrastruktur data,
- Menerapkan kebijakan pelindungan data pribadi,
- Memastikan kepatuhan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Melaporkan setiap insiden keamanan dan pelanggaran data pribadi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA




# HAK-HAK SUBJEK DATA YANG HARUS DIPENUHI

Setiap warga negara sebagai subjek data memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pemahaman dan implementasi hak-hak ini adalah kunci kepercayaan publik.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# HAK-HAK SUBJEK DATA YANG HARUS DIPENUHI

## HAK AKSES

Warga berhak mengetahui data pribadi apa saja yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan siapa yang mengaksesnya.

## HAK HAPUS

Dalam kondisi tertentu, warga berhak meminta penghapusan data pribadi mereka dari sistem pemerintah daerah.

## HAK PORTABILITAS

Warga berhak meminta salinan data pribadi mereka dalam format yang mudah dibaca dan dapat dipindahkan ke sistem lain.

## HAK KOREKSI

Warga dapat meminta pembetulan atau perbaikan data pribadi yang tidak akurat atau tidak lengkap untuk memastikan kebenaran informasi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# HAK-HAK SUBJEK DATA YANG HARUS DIPENUHI

## HAK KEBERATAN

Warga dapat mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau merugikan.

## HAK MENARIK PERSETUJUAN

Warga dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan sebelumnya untuk pemrosesan data pribadi mereka kapan saja.



©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



# KEWAJIBAN PELAPORAN INSIDEN KEAMANAN DATA

## Protokol Respon Cepat

UU PDP menetapkan kewajiban ketat bagi pengendali data untuk segera merespon dan melaporkan setiap insiden keamanan data. Kecepatan dan transparansi dalam penanganan insiden adalah kunci untuk meminimalkan dampak dan mempertahankan kepercayaan publik.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# KEWAJIBAN PELAPORAN INSIDEN KEAMANAN DATA



## Pelaporan 3×24 Jam

Wajib melaporkan insiden kepada otoritas terkait (Badan PDP) dalam waktu maksimal 3x24 jam sejak insiden terdeteksi.



## Notifikasi Subjek Data

Memberitahukan warga yang datanya terdampak dengan informasi yang jelas dan transparan.



## Dokumentasi Insiden

Mencatat seluruh detail insiden, penyebab, dampak, dan langkah mitigasi untuk pembelajaran.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI

Setiap pemrosesan data pribadi oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum yang sah. UU PDP menetapkan 6 dasar pemrosesan yang dapat digunakan, dengan kepentingan publik menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI



## Persetujuan/Consent Subjek Data

Pemrosesan berdasarkan persetujuan eksplisit dan terinformasi dari warga untuk tujuan spesifik yang telah dijelaskan.



## Kewajiban Hukum

Pemrosesan diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

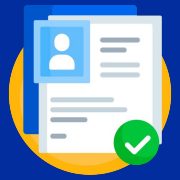
ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022 | LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI



## Kepentingan Publik

Pemrosesan dilakukan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemda.



## Pelaksanaan Kontrak

Pemrosesan diperlukan untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian dengan subjek data atau untuk persiapan kontrak.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# DASAR PEMROSESAN DATA PRIBADI



## Kepentingan Vital

Pemrosesan diperlukan untuk melindungi kepentingan vital subjek data atau orang lain, seperti dalam situasi darurat.



## Kepentingan Sah Lainnya

Pemrosesan diperlukan untuk menjalankan aktivitas pemrosesan untuk keperluan internal pemda.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022 | LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# PELANGGARAN PDP OLEH INDIVIDU DAN KORPORASI

**Pasal 67 UU PDP**

## Sanksi Pidana

- Mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya → Pidana penjara max 4 tahun, Pidana denda max 4 miliar
- Memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi
- Menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya
  → Memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi
- Membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi → Membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi

**Pidana denda Korporasi** paling banyak **10 (sepuluh) kali** dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

## SANKSI ADMINISTRATIF

Pelanggaran pemenuhan ketentuan mengenai kewajiban

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi
- Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
- Denda administratif

Maksimal 2% pendapatan/penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran

## PERDATA

**Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi** atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



# SANKSI ADMINISTRATIF PDP

Pengendali dan/atau Prosesor Data Pribadi yang melakukan pelanggaran administratif PDP dikenai sanksi administratif.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# SANKSI ADMINISTRATIF PDP

## Jenis Sanksi Administratif

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara pemrosesan
- Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi
- Denda Administratif

## Arah Pengaturan

**Pengenaan mempertimbangkan:**

- Tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan
- Kelangsungan kegiatan usaha Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi
- Kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data
- Pribadi atau Prosesor Data Pribadi
- Dasar pertimbangan dan alasan yang jelas

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# SANKSI ADMINISTRATIF PDP

## Denda Administratif

Paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan variabel pelanggan:



## Arah Pengaturan

- Dampak Negatif yang Ditimbulkan.
- Durasi Waktu Terjadinya Pelanggaran.
- Jenis Data Pribadi yang Terdampak.
- Jumlah Orang yang Terdampak.
- Proses Temuan Pelanggaran.
- Tingkat Keterbukaan dan Kerjasama Dalam Proses Penyelidikan.
- Skala Usaha.
- Kemampuan Untuk Membayar.
- Kepatuhan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
- Konsideran Lain yang Relevan.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA




# PILAR IMPLEMENTASI PDP DI PEMERINTAH DAERAH

Implementasi perlindungan data pribadi yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Empat pilar ini menjadi pondasi untuk membangun kerangka kerja PDP yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# PILAR IMPLEMENTASI PDP DI PEMERINTAH DAERAH



## Data Mapping

Identifikasi menyeluruh atas seluruh data pribadi yang dikumpulkan, diproses, disimpan, dan dibagikan di setiap OPD.



## Struktur Governance

Pembentukan struktur tata kelola yang jelas dengan penanggung jawab, DPO, dan tim lintas-OPD yang terkoordinasi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# PILAR IMPLEMENTASI PDP DI PEMERINTAH DAERAH




## Kebijakan & SOP

Penyusunan kebijakan internal dan prosedur operasional standar untuk setiap aspek pemrosesan data pribadi.



## Kontrol Teknis

Implementasi teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan sistem monitoring untuk melindungi data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



## Pilar 1: Kebijakan dan Prosedur yang Komprehensif

Dokumen kebijakan dan prosedur operasional standar adalah tulang punggung implementasi PDP. Mereka memberikan panduan praktis bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas yang melibatkan data pribadi.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# Pilar 1: Kebijakan dan Prosedur yang Komprehensif

## SOP Pemrosesan Data

Prosedur detail untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan berbagi data pribadi.



## SOP Penanganan Insiden

Protokol respons cepat untuk deteksi, mitigasi, pelaporan, dan pemulihan dari insiden keamanan.






## Kebijakan PDP Pemda

Dokumen induk yang menetapkan visi, prinsip, dan komitmen pemda terhadap perlindungan data pribadi.



## SOP Hak Subjek Data

Tata cara menanggapi permintaan warga terkait akses, koreksi, hapus, dan hak-hak lainnya.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



## Pilar 2: Struktur Governance PDP yang Efektif

Tata kelola yang kuat memerlukan struktur organisasi yang jelas dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Setiap pemangku kepentingan harus memahami perannya dalam ekosistem perlindungan data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

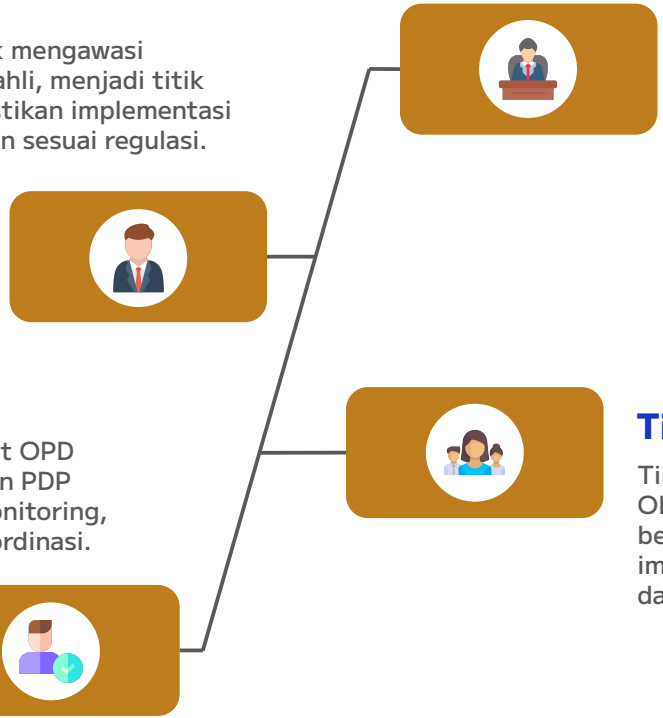
MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# Pilar 2: Struktur Governance PDP yang Efektif

## Data Protection Officer (DPO)

Pejabat khusus yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan PDP, memberikan saran ahli, menjadi titik kontak dengan otoritas, dan memastikan implementasi kebijakan perlindungan data berjalan sesuai regulasi.



## Penanggung Jawab PDP

Pejabat tingkat strategis (idealnya Sekda atau pejabat setingkat) yang bertanggung jawab penuh atas implementasi dan kepatuhan PDP di seluruh pemda, dengan kewenangan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

## PIC PDP di Setiap OPD

Penanggung jawab operasional di tingkat OPD yang memastikan implementasi kebijakan PDP dalam operasional harian, melakukan monitoring, dan melaporkan isu ke DPO atau tim koordinasi.

## Tim Koordinasi Lintas-OPD

Tim yang terdiri dari perwakilan setiap OPD yang mengelola data pribadi, bertanggung jawab untuk koordinasi implementasi, harmonisasi kebijakan, dan berbagi praktik terbaik antar-OPD.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



# Pilar 3: Data Mapping - Memahami Lanskap Data

*Langkah Awal yang Krusial*

Data mapping adalah fondasi dari seluruh program perlindungan data pribadi. Tanpa pemahaman mendalam tentang data apa yang dimiliki, di mana disimpan, bagaimana mengalir, dan siapa yang mengaksesnya, mustahil untuk melindungi data secara efektif. Proses ini melibatkan **inventarisasi/ *Record of Processing Activities* (ROPA)** menyeluruh di setiap OPD untuk mengidentifikasi seluruh sistem, aplikasi, dan proses bisnis yang melibatkan data pribadi warga.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# Pilar 3: Data Mapping - Memahami Lanskap Data

*Langkah Awal yang Krusial*

## Identifikasi Layanan

Katalog lengkap layanan publik yang mengumpulkan data pribadi.

## Pemetaan Alur Data

Visualisasi perjalanan data dari pengumpulan hingga penghapusan.

## Lokasi Penyimpanan

Database, server, cloud, dan media penyimpanan lainnya.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Pilar 3: Data Mapping - Memahami Lanskap Data

*Langkah Awal yang Krusial*

## Analisis Vendor

Pihak ketiga yang memproses data atas nama pemda.

## Penilaian Risiko

Evaluasi tingkat risiko setiap pemrosesan data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA



## Pilar 4: Kontrol Teknis untuk Keamanan Data Pribadi

Pelindungan data tidak lengkap tanpa implementasi kontrol teknis yang efektif. Teknologi keamanan modern menyediakan lapisan perlindungan yang kritis untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Pilar 4: Kontrol Teknis untuk Keamanan Data Pribadi

## Enkripsi Data

Enkripsi end-to-end untuk data dalam penyimpanan dan transmisi, memastikan data tidak dapat dibaca tanpa kunci akses yang sah.

## Multi-Factor Authentication

Autentikasi berlapis untuk akses sistem yang mengandung data pribadi, mencegah akses tidak sah meski password bocor.

## Logging and Monitoring

Pencatatan dan pemantauan real-time seluruh aktivitas akses dan pemrosesan data untuk deteksi dini anomali.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Pilar 4: Kontrol Teknis untuk Keamanan Data Pribadi

## Network Segmentation

Pemisahan jaringan berdasarkan tingkat sensitivitas data untuk membatasi dampak jika terjadi peretasan.

## Kebijakan Retensi Data

Sistem otomatis untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan sesuai jadwal retensi yang ditetapkan.

## Pengujian Keamanan

Pemindaian berkala untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 1

## Mengatasi Kebocoran via WhatsApp

Konsultasi · Pelatihan · Pengembangan

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 1

## Mengatasi Kebocoran via WhatsApp




### Permasalahan yang Dihadapi

Pemda X mengalami insiden kebocoran data pribadi warga yang cukup serius melalui aplikasi WhatsApp. Pegawai tidak sengaja membagikan dokumen berisi data pribadi sensitif (NIK, alamat, nomor telepon) ke grup WhatsApp yang salah. Data tersebut tersebar luas sebelum dapat ditarik kembali.

Solusinya Bagaimana>>

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 1

## Mengatasi Kebocoran via WhatsApp




## Solusi yang Diterapkan

- Penyusunan SOP komunikasi digital yang ketat untuk berbagi informasi yang mengandung data pribadi,
- Pelatihan awareness keamanan data untuk seluruh pegawai,
- Implementasi sistem kontrol akses berbasis peran untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses data sensitif,
- Penerapan aplikasi komunikasi internal yang lebih aman dengan enkripsi dan kontrol akses.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 2

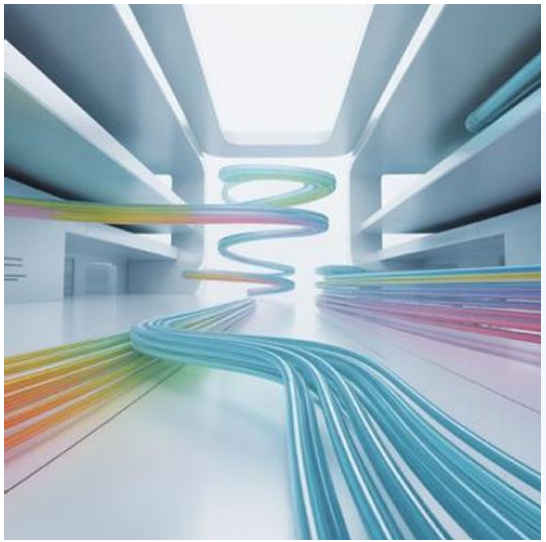
## Data Mapping Mengungkap Risiko Tersembunyi

Konsultasi · Pelatihan · Pengembangan

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 2

## Data Mapping Mengungkap Risiko Tersembunyi



### Permasalahan yang Dihadapi

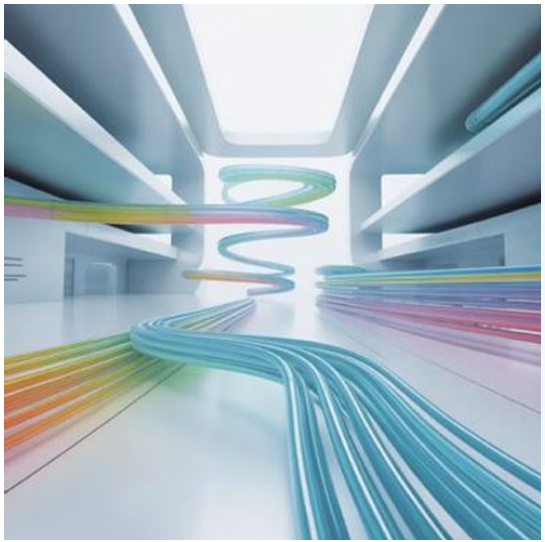
Pemda Y tidak memiliki inventarisasi atau pemetaan data pribadi yang komprehensif. Mereka tidak mengetahui secara pasti data apa saja yang dikumpulkan, di mana disimpan, dan bagaimana mengalir antar sistem. Kondisi ini menciptakan risiko keamanan yang tidak teridentifikasi.

**Solusinya Bagaimana>>**

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# CONTOH STUDI KASUS 2

## Data Mapping Mengungkap Risiko Tersembunyi



## Solusi yang Diterapkan

- Melakukan data mapping menyeluruh di XX OPD yang mengelola data pribadi dalam jumlah besar,
- Mengidentifikasi dan mendokumentasikan alur data dari titik pengumpulan hingga penghapusan,
- Melakukan review vendor dan pihak ketiga yang memproses data,
- Penilaian risiko untuk setiap alur pemrosesan data.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# ROADMAP IMPLEMENTASI

Implementasi perlindungan data pribadi memerlukan perencanaan yang matang dan pendekatan bertahap. Roadmap ini memberikan kerangka waktu realistis untuk membangun fondasi PDP yang kuat di pemerintah daerah.

## FASE 2: Data Mapping

Fase inventarisasi dan pemetaan menyeluruh. Tim melakukan identifikasi semua layanan yang mengumpulkan data pribadi, memetakan alur data, mengidentifikasi lokasi penyimpanan, dan melakukan penilaian risiko awal untuk setiap pemrosesan.

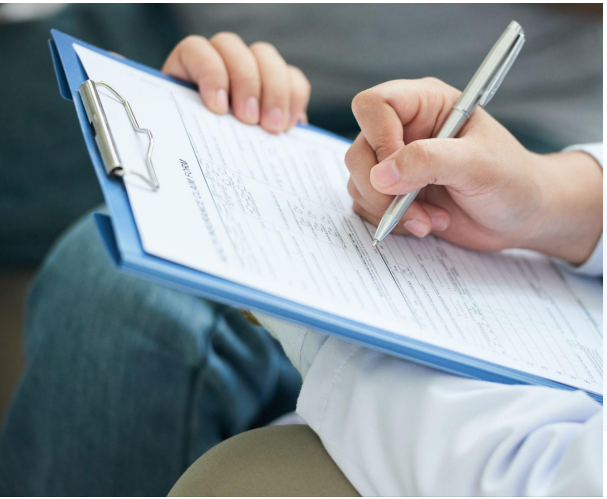
1. 2. 3.

## FASE 1: Kebijakan & SOP

Fase penyusunan kerangka normatif. Berdasarkan hasil mapping, tim menyusun kebijakan PDP pemda, SOP pemrosesan data, SOP hak subjek data, dan SOP penanganan insiden. Sosialisasi awal kebijakan ke seluruh OPD dimulai.

## Fase 3: Implementasi Teknis

Fase implementasi kontrol keamanan dan awareness. Penerapan teknologi keamanan prioritas (enkripsi, MFA, logging), program pelatihan untuk pegawai, peluncuran kampanye awareness, dan pembentukan mekanisme monitoring kepatuhan berkelanjutan.



# QUICK WINS UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PDP

Tidak perlu menunggu program besar dimulai. Beberapa langkah cepat ini dapat diimplementasikan dalam waktu singkat namun memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan keamanan data di pemerintah daerah.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

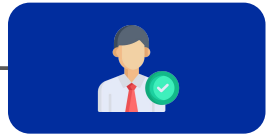
# QUICK WINS UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PDP

## Terbitkan Privacy Notice

Buat dan publikasikan pemberitahuan privasi di setiap layanan publik yang mengumpulkan data pribadi. Jelaskan data apa yang dikumpulkan, untuk apa, dan bagaimana warga dapat menggunakan hak-haknya. Template dapat diadopsi dari best practice.



## Tunjuk Data Protection Officer



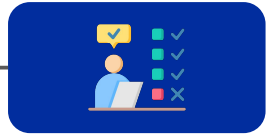
Langkah pertama dan terpenting: menunjuk pejabat yang bertanggung jawab khusus untuk PDP. DPO menjadi focal point koordinasi dan penggerak implementasi. Dapat dimulai dengan penugasan merangkap sambil mencari kandidat ideal.

## Mapping 3 OPD Kritikal

Tidak perlu mapping semua OPD sekaligus. Mulai dari 3 OPD dengan data paling sensitif atau volume terbesar (biasanya Disdukcapil, Dinkes, Disdik). Hasil mapping ini jadi pilot dan pembelajaran untuk OPD lainnya.



## Audit Hak Akses Sistem



Tinjau dan bersihkan daftar pengguna yang memiliki akses ke sistem berisi data pribadi. Cabut akses yang tidak diperlukan, terapkan prinsip least privilege. Ini mengurangi risiko akses tidak sah secara drastis dengan effort minimal.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Kebijakan, Prosedur, dan/atau Standar terkait Implementasi PDP

1. Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP)
2. Kebijakan Keamanan Informasi/Siber (yang telah diselaraskan dengan Kebijakan PDP)
3. Pemberitahuan PDP / Privacy Notice
4. Kebijakan / Standar Retensi Data
5. Kebijakan / Standar Klasifikasi dan Penanganan Data
6. Standar / Klausula Baku Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi / Data Processing Agreement dengan Pengendali dan Prosesor
7. Standar / Panduan Cross Border Data Transfer
8. Prosedur Manajemen Insiden / Pelanggaran dan Komplain PDP
9. prosedur Pelaksanaan Record of Processing Activities (ROPA)
10. Prosedur Pelaksanaan Data Protection Impact Assessment (DPIA)
11. Daftar Risiko PDP (Privacy Risk Register)
12. Standar / Prosedur Manajemen Persetujuan

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Kebijakan, Prosedur, dan/atau Standar terkait Implementasi PDP

## Dokumen Lainnya

1. Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan PDP (Gap Assessment),
2. Perencanaan dan Strategi Penerapan PDP (Roadmap),
3. Template Pelaporan Insiden / Pelanggaran PDP ke Lembaga PDP,
4. Form dan Kanal Pelaporan Insiden / Pelanggaran PDP oleh Subjek Data Pribadi,
5. Standar / template kalimat persetujuan (consent wording),
6. Form Persetujuan Subjek Data Pribadi,
7. Standar / template Legitimate Interest Assessment (LIA),
8. Standar / template Transfer Impact Assessment (TIA),
9. Form Permintaan Subjek Data (DSR),
10. Checklist Audit PDP,
11. Sertifikat Kompetensi DPO/PPDP,
12. Prosedur Verifikasi Identitas (untuk menunjang prosedur DSR),
13. Standar / Prosedur / Panduan Privacy by Design (PbD),

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

# Kebijakan, Prosedur, dan/atau Standar terkait Implementasi PDP

## Dokumen Lainnya

14. Panduan Penerapan Privacy Enhancing Technologies (PET),
15. Hasil / Laporan Evaluasi Awareness and Training PDP
16. Standar / Klausula Baku Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi untuk Intra Organisasi / Binding Corporate Rules (BCR).



©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 | ISO/IEC 27001 : 2022 | LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# LANGKAH STRATEGIS MENUJU KEPATUHAN PDP

## Tiga Pesan Kunci untuk Pemerintah Daerah

### PDP = Kepercayaan Publik

Pelindungan data pribadi bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Data warga adalah amanah yang harus dijaga dengan standar tertinggi.

### Governance Kuat adalah Kunci

Implementasi PDP yang berhasil dimulai dari komitmen kepemimpinan dan struktur tata kelola yang jelas. Tunjuk DPO, bentuk tim koordinasi, tetapkan peran dan tanggung jawab. Tanpa governance yang kuat, teknologi dan kebijakan tidak akan efektif.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022 LSSM-019-IDN LSSMKI-011-IDN

# LANGKAH STRATEGIS MENUJU KEPATUHAN PDP

## Tiga Pesan Kunci untuk Pemerintah Daerah

### Implementasi Roadmap

Jangan menunda implementasi karena menunggu kondisi sempurna. Gunakan roadmap sebagai panduan: data mapping di fase pertama, kebijakan di fase kedua, implementasi teknis di fase ketiga. Manfaatkan quick wins untuk momentum awal.

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA

MITRA BERDAYA OPTIMA

ISO 9001 : 2015 ISO/IEC 27001 : 2022

Komite Akreditasi Nasional

LSSM-019-IDN
LSSMKI-011-IDN

# THANK YOU!



www.mitraberdaya.id business@mitraberdaya.id

©2025 PT MITRA BERDAYA OPTIMA